

ABSTRAK

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat pertanian adalah tindak pidana pencurian hasil pertanian, yang diatur dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian oleh Polsek Kayu Aro, dan (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polsek Kayu Aro dalam penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis empiris, yaitu penelitian berbasis data primer melalui studi lapangan untuk memahami proses terjadinya hukum dan operasionalisasi hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Kayu Aro dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dengan tetap menjunjung tinggi asas legalitas dan hak asasi manusia. Penyidik memastikan setiap tindakan, seperti penangkapan dilakukan berdasarkan prosedur yang sah sesuai KUHP, guna menjamin keadilan bagi korban maupun tersangka. Dalam beberapa kasus, Polsek Kayu Aro juga menerapkan pendekatan Restorative Justice untuk mencapai kesepakatan damai demi menjaga keharmonisan sosial. 2) Dalam proses penegakan hukum terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan biaya operasional, wilayah geografis yang menantang, kurangnya alat transportasi dan komunikasi, sulit menemukan pelaku, sulit mencari saksi, kekurangan alat bukti/barang bukti, Tidak Efektifnya Kerja Sama dengan Aparat Desa atau Masyarakat serta kurangnya dukungan dari pemilik lahan. Kendala-kendala ini menjadi tantangan bagi aparat untuk menegakkan hukum secara optimal dan meminimalkan tindak pidana pencurian hasil pertanian di wilayah tersebut.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian Hasil Pertanian*

ABSTRACT

One of the crimes that often occurs in agricultural communities is the crime of theft of agricultural products, which is regulated in Article 362 of Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code. This research aims to: (1) determine the process of law enforcement regarding criminal acts of theft of agricultural products by the Kayu Aro Police, and (2) to determine the obstacles faced by the Kayu Aro Police in enforcing this law. This research uses an empirical juridical type, namely research based on primary data through field studies to understand the process of law occurrence and the operationalization of law in society. The results of the research show that 1) law enforcement in the Kayu Aro Police jurisdiction is carried out in accordance with the provisions regulated in the Book of Laws. Criminal Procedure Law (KUHAP), the legal process starts from the inquiry, investigation, to prosecution stages, while still upholding the principles of legality and human rights. Investigators ensure that every action, such as an arrest, is carried out based on legal procedures in accordance with the Criminal Procedure Code, in order to ensure justice for victims and suspects. In several cases, the Kayu Aro Police also implemented a Restorative Justice approach to reach a peaceful agreement in order to maintain social harmony. 2) In the law enforcement process there were various obstacles faced, such as limited operational costs, challenging geographical areas, lack of transportation and communication facilities, difficulties finding the perpetrator, difficulty finding witnesses, lack of evidence/evidence, ineffective cooperation with village officials or the community and lack of support from land owners. These obstacles are challenges for authorities to enforce the law optimally and minimize criminal acts of theft of agricultural products in region.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Theft of Agricultural Products*

